

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau rumah tangga di dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada sejauh mana pendapatan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau kelompok, dan berapa banyak yang tersisa untuk populasi lainnya. Pada intinya, ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau rumah tangga di dalam suatu masyarakat.

Definisi dari ketimpangan pendapatan sendiri seringkali dimaknai sebagai sebuah fenomena dimana terdapat selisih atau gap antara masyarakat ekonomi ke atas dan masyarakat ekonomi ke bawah yang berpihak sebelah. Pada negara-negara berkembang kondisi yang berlangsung adalah jumlah masyarakat kaya yang lebih banyak dibandingkan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Penyebab dari

terjadinya ketimpangan pembangunan, menurut Kristiyanti (2007), adalah karena adanya tiga faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor alami, faktor kondisi sosial, dan keputusan-keputusan kebijakan. Faktor alami meliputi kondisi agroklimat, sumber daya alam, lokasi geografis, jarak pelabuhan dengan pusat aktivitas ekonomi, lokasi geografis, dan wilayah potensial untuk pembangunan ekonomi. Sementara faktor sosial budaya meliputi nilai tradisi, mobilitas ekonomi, inovasi, dan wirausaha. Sedangkan faktor keputusan kebijakan adalah sejumlah kebijakan yang mendukung secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan terjadinya ketimpangan.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerahdaerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004). Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, yaitu kategorisasi kurva Lorenz, dan menggunakan koefisien Gini.

2.1.1.1 Koefisien Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka nol bermakna bahwa tingkat pemerataan dari suatu variabel cukup baik. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semua pendapatan, semakin mendekati angka satu menandakan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan. Indeks Gini dikembangkan oleh seorang ilmuwan Italia bernama Corrado Gini. Karya ini dipublikasikan tahun 1912 dengan judul “*Variabilità e mutabilità*”. Menurut Todaro dan Smith, (2006), Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan daerah secara keseluruhan.

2.1.1.2 Metode Perhitungan Koefisien Gini

Metode perhitungan Koefisien Gini yang diperkenalkan oleh Corrado Gini pada tahun 1909 melalui bukunya yang berjudul "*Concentration and dependency ratios*" (in Italian). English translation in *Rivista di Politica Economica*, 87 (1997), 769–789, adalah :

$$G \text{ (Gini Indeks)} = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |X_i - X_j|}{2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N X_j} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

N = jumlah golongan pendapatan, misal N=3 maka populasi penduduk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu berpendapatan tinggi, menengah dan rendah; x =

share pendapatan nasional dari masing-masing kelompok, misal $x_1 = 50\%$ artinya kelompok berpendapatan tinggi menyumbang 50 % dari pendapatan nasional.

Menurut Sjafrizal (dalam Fitriyah dan Rachmawati, 2012) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

2.1.1.3 Ukuran Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini Ratio. Rasio indeks gini adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu daerah. Indeks Gini dikembangkan oleh seorang ilmuwan Italia bernama Corrado Gini. Karya ini dipublikasikan tahun 1912 dengan judul “Variabilità e mutabilità”. Menurut Todaro dan Smith, 2006, Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan daerah secara keseluruhan. Kriteria ketimpangan agregat berdasarkan Koefisien Gini adalah :

1. $G < 0.35$: ketimpangan rendah
2. $0.35 \leq G \leq 0.5$: ketimpangan sedang
3. $G > 0.5$: ketimpangan tinggi

Terjadinya ketimpangan pendapatan ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan

pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (BPS) adalah jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah tertentu, atau bisa dikatakan dengan jumlah akhir nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan Menurut (Todaro, 2002) PDRB ialah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). PDRB dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Hal ini disebabkan perhitungan PDRB yang lebih menyempit dari perhitungan PDB. PDRB hanya mengukur pertumbuhan perekonomian di lingkup wilayah, yaitu mencakup wilayah provinsi atau kabupaten. PDRB merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu, baik berdasarkan harga konstan maupun atas dasar harga berlaku.

Pada PDRB atas dasar harga berlaku jumlah akhir nilai barang dan jasa pada PDRB harus sama dengan jumlah akhir nilai barang dan jasa yang diperoleh dari hasil produksi, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga berlaku pada satu tahun untung dijadikan tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan 3 macam pendekatan yaitu:

A. Pendekatan Produksi

Pada pendekatan produksi menjelaskan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 17 sektor produksi yang disajikan dalam unit pendekatan produksi yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, pengolahan limbah sampah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan jasa lainnya.

Rumus yang digunakan pada pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$Y = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + \dots (Pn \times Qn) \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

P = Harga Barang

Q = Jumlah Barang

B. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan pengeluaran menjelaskan bahwa PDRB merupakan seluruh komponen permintaan akhir yang berasal dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori & diskrepansi statistik, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Rumus yang digunakan pada pendekatan pengeluaran yaitu :

$$Y = C + I + G + (Ex - Im) \quad \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

Ex = Ekspor

Im = Impor

C. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan pendapatan menjelaskan bahwa PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terdapat pada proses produksi pada wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang dihitung sebelum adanya pemotongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam

definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

Rumus yang digunakan dalam pendekatan pendapatan yaitu :

$$Y = R + W + I + P \dots\dots\dots(2.4)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

R = Sewa

W = Gaji/Upah

I = Bunga

P = Laba

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.3.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek usia hidup indikatornya adalah angka harapan hidup, aspek pengetahuan indikatornya adalah harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah, aspek standar hidup layak indikatornya adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS, 2018). Davies dan Quinlivan (2006) dalam (Farathika Putri Utami, 2020 hlm.103) berpendapat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara selueuh dunia. IPM digunakan

untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup. Nilai indeks IPM berkisar antara 0-100. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita jika IPM hanya dilihat dari pengeluaran per kapita saja, berarti hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/negara berdasarkan pendapatan per tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial (pendidikan dan kesehatan), maka akan dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat. Secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat (Yunitasari, 2007, dalam Farathika Putri Utami, 2020 hlm.103). Dengan kata lain semakin tinggi/baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

IPM diperkenalkan oleh salah satu lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di

negara tersebut. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya (Human Development Report, 1995):

- Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
- Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;
- Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
- Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
- Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

2.1.3.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur indeks pembangunan manusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup penduduk merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup. Berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu

melewati umur tertentu dan banyaknya penduduk yang lahir hidup dalam satu generasi sampai mencapai umur tertentu.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

3. Pengeluaran Per kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

$$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$$

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100 \quad \dots\dots\dots(2.5)$$

Dimana :

Y^{**} = Pengeluaran per kapita disesuaikan

Y^* = Pengeluaran per kapita harga konstan

Y = Pengeluaran per kapita setahun

IHK = Indeks Harga Konsumen

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non

makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

2.1.3.3 Menghitung Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum menghitung indeks pembangunan manusia, setiap komponen IPM dihitung terlebih dahulu. Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \dots\dots\dots(2.6)$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \dots\dots\dots(2.7)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \dots\dots\dots(2.8)$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots(2.9)$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})} \dots\dots\dots(2.10)$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100 \dots\dots\dots(2.11)$$

Indeks pembangunan manusia dihitung menggunakan rata-rata ukur geometrik dikarenakan rata-rata ukur geometrik ini lebih responsif dengan adanya ketimpangan capaian pembangunan, diman jika terdapat satu indikator yang rendah, maka indikator tersebut tidak akan tertutupi oleh indikator lain yang memiliki nilai yang tinggi.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1. Rendah: $IPM < 60$
2. Sedang: $60 \leq IPM < 70$

3. Tinggi: $70 \leq \text{IPM} < 80$
4. Sangat tinggi: $\text{IPM} \geq 80$

Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan beberapa wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM pada suatu daerah atau negara, maka hal tersebut menunjukkan pencapaian pembangunan masyarakat daerah maupun negara tersebut semakin baik.

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan mengacu pada suatu kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan standar hidup minimum. Hal ini dapat mencakup kurangnya akses terhadap makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang memadai, serta terbatasnya peluang ekonomi dan pengucilan sosial. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan memiliki banyak sisi yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk distribusi kekayaan yang tidak merata, kurangnya akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, diskriminasi, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada orang kaya. Kemiskinan sering kali diukur dari segi pendapatan, dengan individu atau rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari ambang batas tertentu (sering kali ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional) dianggap hidup dalam kemiskinan. Namun, kemiskinan bukan hanya kurangnya pendapatan; kemiskinan juga dapat melibatkan kurangnya kekuatan sosial, budaya, dan politik serta pengucilan dari peluang dan sumber daya. Mengatasi kemiskinan membutuhkan pendekatan komprehensif yang memperhitungkan banyak faktor

yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan melibatkan berbagai kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan kesetaraan ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makan atau non makan). Badan Pusat Statistik menghitung jumlah penduduk miskin dan persentasenya melalui hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Perhitungan jumlah penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan yang dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan makanan dan non makanan yang bisa dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Kemiskinan adalah konsep yang kompleks dan memiliki banyak sisi yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks dan sudut pandangnya. Pada intinya, kemiskinan mengacu pada kurangnya sumber daya, peluang, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menjalani kehidupan yang layak.

Beberapa cara yang umum digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan antara lain:

A. Kemiskinan absolut:

Ini mengacu pada kondisi di mana seseorang kekurangan kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka.

B. Kemiskinan relatif:

Kemiskinan relatif mengacu pada kondisi di mana pendapatan atau standar hidup seseorang secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata orang dalam masyarakatnya.

C. Kemiskinan multidimensi:

Kemiskinan multidimensi adalah kondisi di mana seseorang tidak hanya kekurangan sumber daya material, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan faktor-faktor penting lainnya yang berkontribusi pada kehidupan yang memuaskan.

D. Kemiskinan perkotaan:

Kemiskinan ini merujuk pada kemiskinan yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, di mana orang-orang menghadapi tantangan khusus seperti kepadatan penduduk, kurangnya perumahan yang terjangkau, dan terbatasnya kesempatan kerja.

E. Kemiskinan pedesaan:

Kemiskinan ini merujuk pada kemiskinan yang terkonsentrasi di daerah pedesaan, di mana masyarakat menghadapi tantangan khusus seperti terbatasnya

akses terhadap layanan dasar, kurangnya infrastruktur, dan ketergantungan pada pertanian subsisten.

Secara keseluruhan, kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi yang membutuhkan pendekatan multidimensi untuk mengatasi akar masalah dan mengurangi dampaknya.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu akan mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian sebelumnya dan untuk membantu penelitian yang sedang dilaksanakan. Berikut uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaruh PDRB, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015 (Nita Tri Hartini 2015)	- PDRB - IPM	- Investasi - Kemiskinan	Secara simultan PDRB per kapita, investasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan. Uji simultan hanya untuk menguji apakah model regresi baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.	journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/7227/6878

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015- 2019 (Dinda Syahri, Yesy Gustiara 2020)	- Kemiskinan - Ketimpangan n Pendapatan	- PDRB - IPM - Pertumbuh an Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemiskinan berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.	Journal of Trends Economic s and Accountin g Research ISSN 2745- 7710 (Media Online)
3	Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia (Ribut Nurul Tri Wahyuni dan Anugerah Karta Monika 2016)	- Ketimpangan n Pendapatan	- Pendidika n	Bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan semakin meningkat seiring meningkatnya distribusi pendapatan (desil). Dengan kata lain, penambahan pendapatan karena pendidikan, lebih tinggi pada distribusi pendapatan	Jurnal Kependud ukan Indonesia Vol. 11 No. 1 Juni 2016 15- 28 p-ISSN : 1907-2902 (Print) e- ISSN : 2502-8537 (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				teratas (desil ke-9).	
4	Pengaruh Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatra Utara Indonesia. (Munzi Riandi 1), Cut Risya Varlitya, 2020)	- Kemiskinan	- Upah Minimum Provinsi	Variabel bebas pertama yakni kemiskinan memiliki efek positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya variabel bebas kedua yakni upah minimum menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	jurnal.utu.ac.id Vol 6, No 1 (2020)
5	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. (Hindun, Ady Soetojo dan Hariyati 2019)	- Kemiskinan	- Pendidikan - Pengangguran	Bahwa pendidikan dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh.	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2019, Vol.8, No.3, 250-265
6	Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktorfaktor yang	- IPM	- Pertumbuhan Ekonomi - Tenaga Kerja	IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mempengaruhi. (Muhammad Arif, Rossy Agustin Wicaksani, 2017)		- Jumlah Penduduk	Sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.	s Muhammad Magelang
7	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. (Dewi Septiani Dwi Kusuma, Dra.Sudati Nur Sarfiah, Yustirania Septiani, 2019)	- PDRB - IPM	- Inflasi	Product Domestic Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	DINAMIC : Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019
8	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan	- Ketimpangan Pendapatan	- Upah Minimum	Perubahan upah minimum memiliki efek positif pada nilai	Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendapatan di Indonesia. (Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, Muhammad Nasir, 2015)			ketimpangan pendapatan.	Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pages pp. 40- 53
9	Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi (Kamal Idris, Syaparuddin, Siti Hodijah, 2014)	- Kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi - Kesempatan Kerja	Pengaruh pertumbuhan ekonomiterhadap ketimpanganpendapatan di KabupatenMerangin, Sarolangun, MuaroJambi, Tanjung Jabung Baratdan Bungo Provinsi Jambipositif dan tidak signifikan.	Jurnal Paradigma Ekonomika
10	Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014	- Ketimpangan Pendapatan	- Struktur Ekonomi - Upah Minimum Provinsi - Belanja Modal - Investasi	Bahwa PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan juga Kredit Investasi berhubungan negatif dengan besaran ketimpangan Pendapatan. PDRB sektor industri merupakan satu-satunya variabel	JESP-Vol. 7, No 2 Nopember 2015 ISSN 2086-1575

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Muara Nangarumba, 2015)			yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan.	
11	Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia (Muhammad Anshari, Zul Azhar, Ariusni, 2018)	- Ketimpangan Pendapatan	- Pendidikan - Upah Minimum Provinsi - Belanja Modal	Secara bersama-sama pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya variabel pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia.	EcoGen Volume 1, Nomor 3, 5 September 2018
12	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di	- Kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi - Pengangguran	Komponen Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 3 No. 2, 2020, hal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kalimantan Selatan (Verry Noval Ariadi, Muzdalifah, 2020)			Ketimpangan Pendapatan antar 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.	485-499 ISSN 2746-3249
13	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten /Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara (Resha M.AKunenengan, Daisy S.MEngka, Ita PingkanF.Rorong, 2023)	- Kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan hasil dari regresi penelitian ini di dapatkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpanganpendapatan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No. 3 Bulan Maret 2023
14	Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	- Indeks Pembangunan	- Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah LKM dan IPM terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia.	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores Vol.12 No. 01 Edisi Maret Tahun 2022 P.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Maria Agape Widya Prasetya, Princisca Lutfitasari, Justi Sairo, Birgitta Dian Saraswati, 2022)				60-74 ISSN 1907-5189 e-ISSN 2722-6238
15	Analisis Pengaruh Pdrb, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2019 (Ririn Nur Indah Sari, 2021)	- PDRB	- Jumlah Penduduk - Pendidikan	Secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan.	Universitas Muhammadiyah Surakarta Library Tahun 2021

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep dari sebuah penalaran yang mampu memberikan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai konsep yang menggambarkan sebuah persepsi keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

2.2.1 Hubungan PDRB dengan Ketimpangan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengacu pada output ekonomi dari suatu wilayah atau area tertentu. Ketimpangan pendapatan, di sisi lain, mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu-individu di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Kuznets menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, ketimpangan pendapatan antara berbagai kelompok masyarakat pertama-tama akan naik, kemudian turun. Tingginya PDRB mencerminkan keberhasilan suatu wilayah atau daerah dalam mengoptimalkan akan sumber daya yang dimiliki dan tersedia sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut . Namun di beberapa negara sedang berkembang selalu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mencapai sebuah pembangunan ekonomi. Namun kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan pada waktu tertentu kemudian mengalami penurunan pada suatu tingkat tertentu (Arsyad, 2010). Ini sesuai dengan Simon Kuznet (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan makin merata (Kuncoro, 2006).

Adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya, Anggraini Rahmawati (2022) menyatakan bahwa PDRB juga berperan negatif dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Hal ini karena tingkat PDRB didasarkan pada pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga membuat PDRB

berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Juga dalam penelitian Aditya Iswanto (2018) menyatakan bahwa PDRB (Produk Domestik Bruto) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2.2.2 Hubungan IPM dengan Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek usia hidup indikatornya adalah angka harapan hidup, aspek pengetahuan indikatornya adalah harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah, aspek standar hidup layak indikatornya adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Menurut Becker (Tarmidzi, 2012) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Suhendra, et al,

2020 mengatakan bahwa idealnya IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena dengan naiknya IPM akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Dengan adanya SDM yang berkualitas baik maka terdapat perbaikan kompetensi dan peningkatan pengetahuan melalui Pendidikan, maka modal manusia akan membaik melalui peningkatan kualitas SDM yang memudahkan penduduk untuk mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

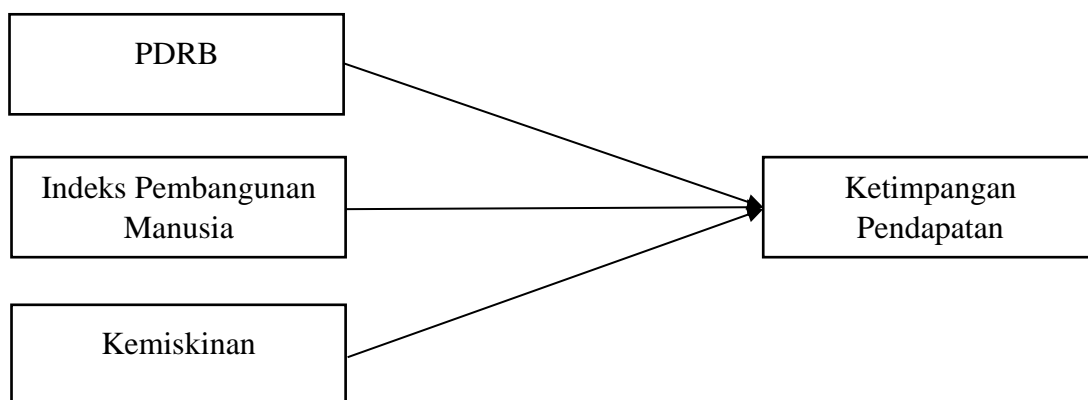
2.2.3 Hubungan Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat, karena ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan dapat memperparah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan relatif. Kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin timpang. Seperti yang ungkapkan oleh Arsyad dalam Hindun (2017) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah.

Adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya, Hindun, Ady Soejoto dan Hariyati (2019) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Juga dalam

penelitian Munzi Riandi, Cut Risya Varlitya (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, PDRB, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan. Secara jelasnya mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dari gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

2. Diduga secara parsial IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
3. Diduga secara parsial Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
4. Diduga secara bersama-sama PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.